



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sumbawa
Tahun 2025**



Tim Penyusun

Penanggungjawab : H. VARIAN BINTORO, S.Sos.,M.Si

Koordinator : AULIAH ASMAN, S.AB, M.AK

Penyusun : SUPARNO, S.AP
IBRAHIM, S.Sos.,M.AP
ELIS PERMATA SARI
SABARIAH, S.AP., M.Si
MAHYUDDIN, S.AP
BAYU AHMAD KURNIAWAN NUR, S.M



Daftar Isi

Halaman Judul
Tim Penyusun
Daftar Isi
Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

1.1	Dasar Pembentukan, Struktur, Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa
1.2	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sarana Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa
1.3	Tujuan Penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa
1.4	Mekanisme Penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa
1.5	Permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa
2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa
2.3	Ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1	Capaian Kinerja a. Definisi Operasional dan Formulasi Pengukuran Kinerja b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 c. Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun n dengan tahun n-1 d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan target Renstra tahun n e. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan kinerja provinsi dan target nasional tahun n f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran tahun n h. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
3.2	Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

4.1	Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi
4.2	Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026 dan disampaikan kepada Bupati Sumbawa. Secara teknis, penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2022 tentang Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026.

Penentuan indikator kinerja program, kegiatan sampai sub kegiatan telah mempertimbangan tujuan, sasaran dan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. Hal itu dimaksudkan agar pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026 dapat terarah dan/atau berkesuaian. Seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2022 telah berhasil dipenuhi, namun demikian kami berkewajiban untuk terus meningkatkan kinerja sesuai kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja untuk turut serta mendukung pencapaian visi Kabupaten Sumbawa 2022-2026 yaitu “Terwujudnya Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban”.

Sumbawa Besar, Februarui 2026
**Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Sumbawa,**

H. VARIAN BINTORO, S.Sos., M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana Dasar hukum penyusunan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKjIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

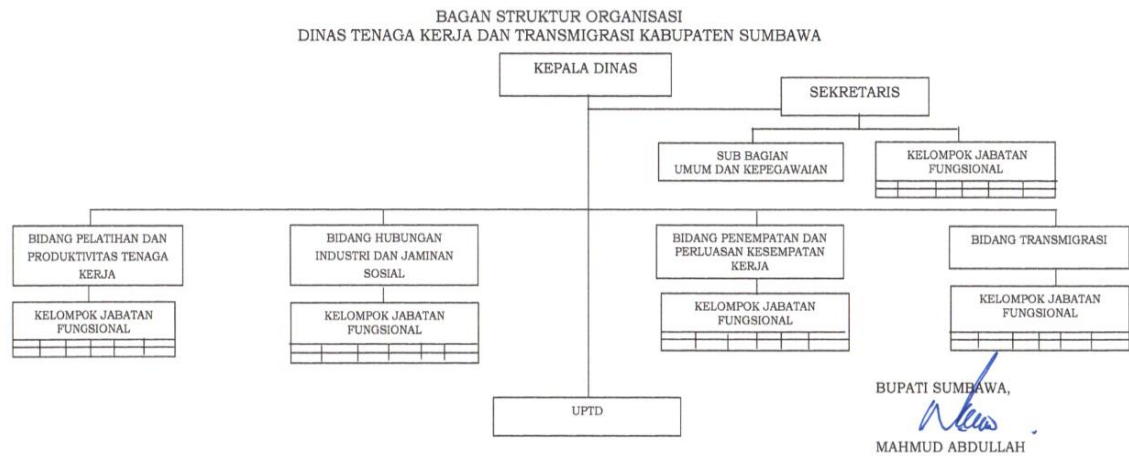
1.1 Dasar Pembentukan, Struktur dan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa terbentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.



Peraturan daerah tersebut di atas merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pada tingkatan lebih tinggi, keberadaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terbentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. Peraturan bupati dimaksud merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, yaitu:



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa juga memiliki 1 Unit Pelaksana Teknis Dinas, yaitu UPT Loka Latihan Kerja yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 87 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, dengan struktur masing-masing sebagai berikut:



Uraian tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa; dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 87 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya yang disajikan hanya tugas dan fungsi dari kepala dinas dan pejabat satu tingkat di bawahnya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

No	Jabatan	Uraian Tugas dan Fungsi
1	Kepala Dinas	Tugas: ▪ membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Tenaga Kerja dan urusan Pemerintahan pilihan bidang Transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi: ▪ Perumusan kebijakan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. ▪ Pelaksanaan Kebijakan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. ▪ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi ▪ Pelaksanaan administrasi Dinas bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan ▪ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
2	Sekretaris Dinas	Tugas: ▪ menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelola keuangan serta urusan umum dan kepegawaian. Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas Fungsi: ▪ Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan; ▪ Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; ▪ Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; ▪ Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; ▪ Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja, dan; ▪ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3	Kabid Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tugas: ▪ merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengembangan produktivitas dan pemagangan tenaga kerja, standarisasi, kompetensi dan pelatihan kerja, serta pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta Fungsi: ▪ penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan produktivitas dan pemagangan tenaga kerja, standardisasi, kompetensi dan pelatihan kerja,serta pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; ▪ pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan produktivitas dan pemagangan tenaga kerja, standardisasi, kompetensi dan pelatihan kerja, serta pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; ▪ pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan produktivitas dan pemagangan tenaga kerja, standardisasi,



No	Jabatan	Uraian Tugas dan Fungsi
		kompetensi dan pelatihan kerja, serta pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; ▪ pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan produktivitas dan pemagangan tenaga kerja, standardisasi, kompetensi dan pelatihan kerja, serta pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; dan ▪ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
4	Kabid Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial	Tugas: ▪ merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis hubungan industrial dan perselisihan tenaga kerja, pengupahan dan jaminan sosial, kelembagaan dan syarat kerja Fungsi: ▪ penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang hubungan industrial dan perselisihan tenaga kerja, pengupahan dan jaminan sosial, serta kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja; ▪ pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang hubungan industrial dan perselisihan tenaga kerja, pengupahan dan jaminan sosial, serta kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja; ▪ pelaksanaan kebijakan teknis bidang hubungan industrial dan perselisihan tenaga kerja, pengupahan dan jaminan sosial, serta kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja; ▪ pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang hubungan industrial dan perselisihan tenaga kerja, pengupahan dan jaminan sosial, serta kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja; dan ▪ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
5	Kabid Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tugas: ▪ merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan perluasan kesempatan kerja Fungsi: ▪ penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan perluasan kesempatan kerja; ▪ pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan perluasan kesempatan kerja; ▪ pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan perluasan kesempatan kerja; ▪ pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan perluasan kesempatan kerja; dan ▪ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6	Kabid Transmigrasi	Tugas: ▪ merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi Fungsi: ▪ penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi; ▪ pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi;



No	Jabatan	Uraian Tugas dan Fungsi
		▪ pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi; ▪ pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi; dan ▪ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7	Kepala UPT LLK	Tugas: ▪ melaksanakan pelatihan kerja Fungsi: ▪ menyusun rencana kerja UPT Loka Latihan Kerja ▪ melaksanakan pelatihan kerja dan uji keterampilan. ▪ Melaksanakan pengkajian dan analisis teknis pelatihan kerja; ▪ Melaksanakan program kerja sama pelatihan; ▪ Melaksanakan penyebaran informasi pelatihan kerja; ▪ Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Loka Latihan Kerja; ▪ Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan UPT LLK; dan ▪ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sarana Prasarana PD

Kuantitas dan kualitas ASN pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa menjadi komponen penting pada aspek Sumber Daya Manusia karena akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan organisasi. ASN di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa terdiri atas PNS dan PPPK, namun terdapat beberapa jenis pekerjaan dalam sejumlah kegiatan yang belum atau tidak dapat dipenuhi oleh kompetensi ASN yang ada saat ini. Maka juga terdapat sejumlah tenaga kontrak yang dilibatkan dalam sejumlah kegiatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian. Sampai dengan Tahun 2025, terdapat 56 orang ASN dan pegawai kontrak yang ditempatkan dan bertugas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, dengan rincian sebagai berikut:

Data SDM berdasarkan Status Kepegawaian:

No	Bagian/Bidang	Jumlah ASN (Orang)	Jumlah PPPK/Kontrak (Orang)	Jumlah Total (Orang)
1	Sekretariat	12	2	14
2	Bidang Latas	5	-	5
3	Bidang Penta	5	5	10
4	Bidang HI	5	1	6
5	Bidang Trans	5	1	6
6	UPT LLK	12	5	17
7	UPT KTM Labangka			-
Jumlah		44	13	58



Data SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan:

No		Status Kepegawaian												Jumlah
		PNS							PPPK/Honorar					
		S3	S2	S1/D4	D3-D1	SMA	SMP	SD	S1/D4	D3-D1	SMA	SMP	SD	
1	Sekretariat		3	6	2	1	-	-	2	-	-	-	-	14
2	Bidang Latas	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
3	Bidang Penta	-	-	4	-		-	-	5	-	1	-	-	10
4	Bidang HI	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6
5	Bidang Trans	-	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6
6	UPT LLK	-	-	10	-	2	-	-	3	-	2	-	-	17
7	UPT KTM Labangka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	5	33	2	3	-	-	12		3			58

Data SDM berdasarkan Batas Usia Pensiun:

No	Bagian	2022	2023	2024	2025	2025	2026	>2026
1	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	14
2	Bidang Latas	-	-	-	-	-	-	5
3	Bidang Penta	-	-	-	-	-	-	10
4	Bidang HI	-	-	-	-	-	-	6
5	Bidang Trans	-	-	-	-	-	-	6
6	UPT LLK	-	-	-	-			17
7	UPT KTM Labangka	-	-	-	-			
Jumlah				-	-	-		58

Selain Sumber Daya Manusia, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi hal penting untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sarana dan Prasarana yang menjadi aset/modal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa terdiri dari tanah, mesin peralatan, aset tetap dan aset tetap lainnya. Berikut data aset Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa berdasarkan KIB (KIB A s.d KIB F) sampai dengan Tahun 2025.

No	Jenis BMD-SKPD		Nilai BMD-SKPD
A.	Aset Tetap		
	1	Tanah (KIB A)	5.250.900.000
	2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	1.694.927.011
	3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	5.661.180.676
	4	Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	266.789.100
	5	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	9.750.000
	6	Konstruksi Dalam pengerjaan (KIB F)	686.494.350
	Jumlah		13.570.041.137
B	Aset Lainnya		
	1	Aset Tidak Berwujud	-
	2	Aset Lain-lain (RB)	333.290.500



	3	Hibah ke masyarakat	
	4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
	5	ekstra kompatible	20.450.000
	Jumlah		353.740.500
	Total Seluruh Aset		13.923.781.637

1.3 Tujuan Penyusunan LKjIP-PD

LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa sebagai suatu instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4 Mekanisme Penyusunan dan Penyampaian LKjIP-PD

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Penyampaian Laporan Kinerja, LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 disusun dengan mekanisme atau tahapan, sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun

Selaku kepala perangkat daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa diamanatkan untuk menyusun dan menyampaikan LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025. Maka sesuai dengan struktur, rincian tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa selanjutnya membentuk dan menetapkan Tim Penyusun (SK terlampir) yang terdiri dari unsur-unsur aparatur yang berkesuaian dengan tugas dan fungsinya serta aparatur lainnya di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kualifikasi personal.

2. Pengumpulan Data Kinerja

Setelah tim sebagaimana dimaksud pada angka 1 terbentuk, maka tim dimaksud selanjutnya melakukan pengumpulan data kinerja dari penanggung jawab data/informasi pada setiap bidang. Pengumpulan data dari para penanggungjawab data/informasi dilakukan sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja. Proses pengumpulan dan perangkuman oleh tim senantiasa memperhatikan beberapa hal penting, antara lain: indikator kinerja yang digunakan/dilaporkan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

3. Pengukuran Kinerja

Tahap berikutnya setelah dilakukan pengumpulan dan perangkuman data kinerja, tim selanjutnya melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh tim adalah dengan membandingkan antara capaian yang direalisasikan dengan target kinerja yang direncanakan. Pengukuran kinerja ini dapat ditentukan secara berkala (triwulan) dan terakumulasi menjadi pengukuran tahunan. Pengukuran dan perbandingan dalam laporan kinerja tersebut dilakukan oleh tim untuk mendapatkan kecukupan informasi sehingga dapat menggambarkan posisi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2024.

4. Penyusunan dan Penyampaian LKjIP

Setelah tahap pengukuran kinerja selesai dilaksanakan, maka tim selanjutnya menyusun dan menyampaikan rancangan atau draft LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 kepada seluruh kepala bidang untuk diverifikasi kesesuaian data kinerja yang telah dikumpulkan, dirangkum dan diukur dengan dokumen perjanjian kinerja yang disepakati sebelumnya secara berjenjang. Setelah seluruh Kepala Bidang menyetujui rancangan atau draft LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 tersebut maka diteruskan penyampaiannya kepada Kepala Dinas selaku Pimpinan Lembaga (perangkat daerah).

5. Reviu atas LKjIP

Setelah Kepala Dinas menerima hasil kerja Tim Penyusun, berupa draft LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 maka selanjutnya disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Sumbawa selaku APIP untuk dilakukan reviu. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Reviu yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sumbawa terhadap LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut di atas, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa melalui Tim Penyusun LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 akan segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/ kesalahan tersebut.

Tahapan reviu tersebut di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. Reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB.

6. Penyampaian LKjIP

Kepala Dinas selaku Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Sumbawa, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah diterima



dan disetujui oleh Bupati Sumbawa, maka selanjutnya dokumen LKjIP di unggah pada aplikasi e-SAKIP REVIU Kementerian PAN-RB.

1.5 Permasalahan utama (strategic issued) PD

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dapat disebutkan bahwa yang disebut sebagai permasalahan PD adalah kesenjangan antara kinerja PD yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai PD di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berbagai permasalahan PD tersebut menjadi hal penting yang akan menjadi dasar penentuan isu strategis bagi PD. Isu strategis itu sendiri merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan dokumen perencanaan PD karena akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi PD dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD di masa yang akan datang.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah disinkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan daerah pada sub urusan penunjang dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa. Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan hasil isian Tabel 1 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026, seperti dibawah ini:

Tabel 1.5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi daripada kebutuhan dunia kerja	Masih tingginya angka pengangguran terbuka	rendahnya keahlian pencari kerja
			informasi pasar kerja belum optimal
		belum teridentifikasi secara jelas potensi tenaga kerja dan kebutuhan dunia kerja	belum ada pendataan dan perencanaan tentang kondisi tenaga kerja



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Masih rendahnya cakupan layanan perlindungan Tk	banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial	Mediasi dan pengawasan tenaga kerja belum optimal
			belum adanya peraturan perusahaan yang mengikat hubungan pekerja dengan perusahaan yang disahkan oleh pemerintah daerah
		Upah minimum kabupaten belum diterapkan secara optimal	sosialisasi belum dilaksanakan dengan baik kepada seluruh perusahaan dan pekerja
			belum ada penerapan sanksi yang tegas kepada pelanggar

Memperhatikan isu strategis di atas Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa (2022-2026), yang menjadi isu utamanya terkait dengan ketenagakejaan.

Permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Kabupaten Sumbawa adalah kualitas angkatan kerja yang rendah, hal ini disebabkan karena kurangnya ketrampilan, kurangnya kompetensi dan kurangnya daya juang/karakter. Kondisi ini berdampak pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) khususnya TPT dengan tingkat pendidikan tinggi masih mendominasi. Disisi lain kesempatan kerja formal di Kabupaten Sumbawa sangat terbatas sehingga perlu dikembangkan perluasan kesempatan kerja. Permasalahan ketenagakerjaan lainnya adalah kurang memadainya perlindungan norma kerja dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan kebijakan lintas sektor yang lebih konkrit baik dari pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk menyiapkan angkatan kerja unggul di Kabupaten Sumbawa dengan strategi peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas. Tahap selanjutnya adalah pengembangan sistem antar kerja yang dapat mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas Informasi Pasar Kerja, penyuluhan Bimbingan dan Jabatan serta perantaraan kerja. untuk mengatasi terbatasnya kesempatan kerja formal perlu dilakukan perluasan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja.

Perlindungan terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan

kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Implementasi norma kerja dan norma K3 masih banyak mengalami kendala, hal ini disebabkan karena masih rendahnya komitmen perusahaan, keterlibatan pekerja/buruh masih rendah dan tidak adanya akses bagi pekerja/buruh untuk memberikan masukan kepada perusahaan terkait pemenuhan hak norma kerja dan norma K3. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, perlu dilakukan optimalisasi pembinaan dan deteksi dini hubungan industrial, implementasi Struktur Upah dan Skala Upah serta pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan norma kerja dan norma K3.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berkenaan. Perencanaan kinerja, mencakup rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya pada tahun berkenaan.

Perencanaan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2025, berpedoman pada beberapa dokumen yang merupakan amanat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang ditetapkan oleh pusat maupun yang merupakan kebijakan lokal daerah, antara lain:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 87 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa; dan
- c. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2022-2026, visi Kabupaten Sumbawa adalah :

"Sumbawa Gemilang Berkeadaban"

Dalam rumusan visi Kabupaten Sumbawa 2022-2026 tersebut terdapat dua kalimat kunci (Key Word) sebagai pokok-pokok visi yang menjiwai seluruh rumusan visi tersebut, yaitu Sumbawa Gemilang dan Sumbawa Berkeadaban. Makna yang terkandung di dalam pernyataan Visi tersebut, adalah sebagai berikut.



1. Sumbawa Gemilang mengandung makna kabupaten Sumbawa yang memiliki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

2. Berkeadaban

Pernyataan berkeadaban mengandung makna masyarakat Sumbawa memegang teguh agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari (Adat Barenti Ko Sara', Sara' Barenti Ko Kitabullah, Taket Ko Nene Kangila Boat Ienge) sehingga terbentuk kondisi kehidupan yang "Senap Semu" (Dimensi kesejahteraan spiritual). Situasi kehidupan masyarakat sejahtera secara spiritual, masyarakat yang diliputi oleh suasana kedamaian dan ketentraman sebagai berkah ALLah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas ketaqwaan hamba-Nya dalam menjalankan perintah agama, "Riam Remo" (dimensi kesejahteraan sosial yaitu gambaran suasana masyarakat yang penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga Negara), "Nyaman Nyawe" (kesejahteraan ekonomi merupakan gambaran kondisi masyarakat yang berkecukupan. Berkecukupan mengandung pengertian bahwa ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup. Artinya masyarakat "Nyaman Nyawe" merupakan wujud masyarakat maju dan sejahtera sebagai implikasi keberhasilan pembangunan.

Sedangkan Misi Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

1. Sumbawa Sehat dan Cerdas;
2. Sumbawa Sejahtera dan Mandiri;
3. Sumbawa Bersih dan Melayani;
4. Sumbawa Aman dan Berbudaya;
5. Sumbawa Tangguh dan Berkelanjutan;

Untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran RPJMD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa melaksanakan satu program generik/rutin dan enam program teknis. Memperhatikan tugas dan fungsi di atas, maka terdapat hubungan dan kesesuaian yang tegas antara visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya dinyatakan dalam penentuan tujuan dan sasaran beserta indikatornya pada dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.



2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa

Sebelum menyajikan rencana kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, maka akan disajikan terlebih dahulu tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026. Tujuan perangkat daerah didefinisikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, sedangkan sasaran strategis perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, berupa manfaat yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. Sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD, penentuan tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa berfokus terhadap indikator sasaran daerah yang berkesuaian dengan kewenangan, yaitu yang terkait dengan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik melalui gerakan atau program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan. Tabel berikut merupakan bentuk informasi bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa telah memastikan kontribusinya upaya pencapaian target indikator kinerja sasaran daerah, yaitu:

Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun ke-				
			2022	2023	2024	2025	2025
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sub Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		Nilai Reformasi Birokrasi	51,32	51,91	52,50	55,00	57,50
	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakertrans	Kategori Predikat hasil Evaluasi AKIP-PD	BB	BB	BB	BB	BB
	2. Optimalnya Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sub Urusan Tenaga Kerja	%	100	100	100	100



	3. Optimalnya Penyelenggaraan Ketrasmigrasian di daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sub Urusan Transmigrasi	%	100	100	100	100
--	---	---	---	-----	-----	-----	-----

Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa di atas dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kepada sasaran pemerintah daerah yaitu Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa adalah membantu Bupati Sumbawa melaksanakan kewenangan otonomi daerah bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian. Maka nomenklatur tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa telah ditentukan dalam rangka mendukung pelaksanaan misi kedua dan ketiga dari Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2022-2026.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa

Sesuai ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka strategi dalam konteks perangkat daerah didefinisikan sebagai suatu langkah berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, sedangkan arah kebijakan dalam konteks perangkat daerah dimaksudkan sebagai suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa beserta indikator dan targetnya, maka selanjutnya dilaksanakan penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada ketercapaian dari target yang telah ditentukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Sub Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan RB	1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	1. Optimalisasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			2	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			3	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			4	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			5	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			6	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan



				Pemerintah Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			7	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			8	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Sub Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan RB	1. Optimalnya Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di daerah	1. Optimalisasi penyusunan dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	1	Menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)
		2. Optimalisasi penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2	Melaksanakan Pelatihan berdasarkan Uni Kompetensi
			3	Membina Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
			4	Mengatur Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
			5	Memberikan layanan Konsultansi Produktivitas



				pada Perusahaan Kecil
			6	Melakukan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah
		3. Optimalisasi penataan dan Penempatan Tenaga Kerja	7	Memberikan Layanan antar Kerja di Daerah
			8	Menerbitkan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah
			9	Mengelola Informasi Pasar Kerja
			10	Memberikan Pelindungan bagi PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah
			11	Menerbitkan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerjanya dalam Daerah
		4. Optimalisasi Pengelolaan Hubungan Industrial	12	Mengesahkan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi di Daerah
			13	Melakukan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Sub Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan RB	2. Optimalnya Penyelenggaraan Ketransmigrasian di daerah	1. Optimalisasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1	Menata Persebaran Penduduk yang Berasal dari Daerah



		2. Optimalisasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi	2	Mengembangkan Satuan Permukiman ke tahap Kemandirian
--	--	---	---	--

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka berbagai strategi yang di dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa selanjutnya dioperasionalisasikan dalam program-program yang telah disebutkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026, yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- c. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- d. Program Penempatan Tenaga Kerja
- e. Program Hubungan Industrial
- f. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- g. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

2.3 Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja strategis, namun juga pada indikator kinerja yang dihasilkan atas kegiatan dan/atau sub kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja *outcome* yang seharusnya terwujud akibat pelaksanaan sejumlah kegiatan dan sub kegiatan di dalamnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan pada level sasaran strategis akan dipengaruhi oleh capaian kinerja *outcome* yang dihasilkan, yang dipengaruhi oleh capaian kinerja *output* kegiatan dan/atau sub kegiatan, sehingga terwujud kesinambungan kinerja pada setiap jenjangnya.

Pada tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu



dilakukan karena adanya Perubahan Terhadap Rencana Strategis Dinas. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Disnakertrans	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP-Disnakertrans	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.119.477.003
2	Optimalnya Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sub Urusan Tenaga Kerja	100%	Program Perencanaan Tenaga Kerja	32.827.400
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	997.893.641
				Program Penempatan Tenaga Kerja	266.206.936
				Program Hubungan Industrial	135.063.500
3	Optimalnya Penyelenggaraan Ketransmigrasian di daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sub Urusan Transmigrasi	100%	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	33.378.500
				Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	55.292.100



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran terhadap suatu kinerja ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sehingga menjadi suatu keharusan untuk menyusun menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terutama untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu indikator kinerja instansi pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi dasar dan pedoman yang digunakan untuk mengukur dan menyampaikan laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang menjadi dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

Formulasi Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Sumbawa melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu *outputnya* adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize* dan *minimize*. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi dan nilai kinerja adalah sebagaimana penjelasan berikut :

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.



2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi/Target})] \times 100\%$$

Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Nilai Kinerja, diperoleh dengan tahapan:

- a. Perhitungan Capaian Indikator Kinerja, yang dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan Indikator Kinerja untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan di atas.
- b. Perhitungan Nilai Kinerja Agregat, yang dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh Capaian Indikator Kinerja sebagai nilai *mean* Capaian Indikator Kinerja keseluruhan.

Kategori nilai realisasi dan capaian kinerja diinterpretasikan berdasarkan pengelompokan dalam skala ordinal, sebagaimana disebutkan dalam PMDN Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD beserta perubahannya, serta RKPD sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Kriteria Realisasi/Tingkat Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja		Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan
1.	91 - ≤100	Sangat Tinggi	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2.	76 - ≤90	Tinggi	
3.	66 - ≤75	Sedang	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4.	51 - ≤65	Rendah	Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5.	≤50	Sangat Rendah	

Sesuai amanat dan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,



yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan kinerja pemerintah, dipersyaratkan bahwa informasi atau data tentang realisasi atau tingkat capaian suatu indikator harus berasal dari sumber yang dapat diakui dan dipercaya keabsahannya, baik dari sisi tata cara atau metode perhitungan dan dari sisi pihak yang melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian sampai dengan publikasinya. Data atau informasi tentang capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini tidak hanya bersumber dari hasil pengukuran mandiri atau internal, namun juga bersumber dari Lembaga instansi eksternal yang berdasarkan suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan tertentu memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengolah sampai dengan menyajikan dan/atau mempublikasikan suatu data atau informasi tertentu kepada publik.

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan Renstra Tahun 2022-2026 yang telah diubah pada Tahun 2024 lalu, maka terjadi penyesuaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. Sebelum menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersumber dari indikator sasaran strategis dalam Renstra, berikut disajikan capaian IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, sebagai berikut:

Capaian Kinerja IKU Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja PD	Kategori Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kategori	BB	BB	90,84	
2	Peningkatan Kinerja Pelayanan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Optimalnya Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di daerah	%	65	236,93	364,51	
		Optimalnya Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di daerah	%	29	100	344,83	
		Rata-Rata				266,73	
		Tertinggi				364,51	
		Terendah				90,84	



Terhadap IKD, pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 pada dasarnya dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Untuk setiap indikator sasaran strategis daerah yang menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD), akan disajikan secara lengkap berdasarkan:

- a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja;
- b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja;
- c. Pembandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun n dengan tahun n-1;
- d. Pembandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan target RPJMD tahun n;
- e. Pembandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan kinerja provinsi dan target nasional tahun n;
- f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- h. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

sebagai berikut:

a. Definisi Operasional dan Formulasi Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakertrans	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Disnakertrans	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Nilai AKIP PD tahun n-1 Publikasi Inspektorat tahun n
2	Optimalnya Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sub Urusan Tenaga Kerja	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sub Urusan Tenaga Kerja adalah aktivitas untuk mencapai beberapa indikator kinerja utama dalam program ketenagakerjaan	Rata rata capaian kinerja program tenaga kerja tahun n



3	Optimalnya Penyelenggaraan Ketransmigrasian di daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sub Urusan Transmigrasi		Rata rata capaian kinerja program transmigrasi tahun n
---	---	---	--	--

b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja IKD Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, disusun sesuai PK yang disusun dengan memperhatikan indikator dan target sasaran strategis daerah Tahun 2025, sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakertrans	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Disnakertrans	Kategori	BB	BB	71,69	sedang
2	Optimalnya Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sub Urusan Tenaga Kerja	%	100	236,93	236,93	Tinggi
3	Optimalnya Penyelenggaraan Ketransmigrasian di daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sub Urusan Transmigrasi	%	100	100	100,00	Tinggi
		Capaian Rata-Rata	%			136,207	
		Capaian Tertinggi	%			236,93	
		Capaian Terendah	%			71,69	

c. Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun n dengan tahun n-1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun n-1 (2023)	Capaian Tahun n (2024)	Naik (+)/ Turun (-)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakertrans	1	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Disnakertrans	Kategori	73,24	71,60	-1,64
2	Optimalnya Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di daerah	2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sub Urusan Tenaga Kerja	%	100	236,93	136,93
3	Optimalnya Penyelenggaraan	3	Capaian Kinerja Penyelenggaraan	%	100	100	



	Ketransmigrasian di daerah		Sub Urusan Transmigrasi				
--	----------------------------	--	-------------------------	--	--	--	--

d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan target Renstra tahun n

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun Akhir	Realisasi Tahun n	Keterangan Kriteria Capaian Kinerja	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakertrans	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Disnakertrans	Kategori	BB	BB	71,69	tercapai
2	Optimalnya Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sub Urusan Tenaga Kerja	%	100	236,93	236,93	tercapai
3	Optimalnya Penyelenggaraan Ketransmigrasian di daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sub Urusan Transmigrasi	%	100	100	100,00	tercapai

e. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan kinerja provinsi dan target nasional tahun n

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun n	Realisasi Pempro Tahun n	Target Nasional Tahun n	Ket
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakertrans	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Disnakertrans	Kategori	BB	A	-	Tidak terdapat target nasional
2	Optimalnya Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sub Urusan Tenaga Kerja	%	236,93	-	-	-
3	Optimalnya Penyelenggaraan Ketransmigrasian di daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sub Urusan Transmigrasi	%	100	-	-	-



f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Analisis Penyebab Tingkat Capaian	Alternatif Solusi/Strategi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakertrans	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Disnakertrans	71,69	1 Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Sumbawa Tahun 2024 atas kinerja tahun 2023 menggunakan permenpan RB No.88 Tahun 2022 dengan 4 (empat) komponen/sub komponen/kriteria penilaian, sedangkan LKjIP PD yang disusun serta target yang dirumuskan masih berpedoman pada Permenpan RB No.12 Tahun 2015, dengan 5 (lima) komponen/sub komponen/kriteria penilaian, hal itulah yang menyebabkan penurunan realisasi kinerja	1 Menyusun LKjIP perangkat daerah tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru
				2 Masih terdapat beberapa catatan atas kekurangan untuk melakukan perbaikan manajemen kinerja sesuai laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2024 pada perangkat daerah	2 Menindaklanjuti rekomendasi terhadap hasil penilaian AKIP tahun 2024
2	Optimalnya Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sub Urusan Tenaga Kerja	100		
3	Optimalnya Penyelenggaraan Ketransmigrasian di daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sub Urusan Transmigrasi	100		

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran tahun n

Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif RPJMD/Renstra tahun n (Rp)	Alokasi Anggaran DPPA tahun n (Rp)	Realisasi Anggaran tahun n (Rp)	Capaian Kinerja tahun n (%)	Capaian Realisasi Anggaran tahun n (%)	Pelaksana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	5.888.498.797,00	5.201.976.603,00	5.017.080.704,00	95,59	96,45	Sekdis
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Tersusunnya Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	16.760.000,00	23.439.000,00	23.439.000,00	100,00	100,00	Sekdis
Penyusunan Dok Perencanaan PD	Tersusunnya Dok Perencanaan PD	Jumlah Dok Perencanaan PD	2.420.000,00	7.490.000,00	7.490.000,00	100,00	100,00	Sekdis
Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA- SKPD	Tersedianya Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi	2.240.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00	100,00	100,00	Sekdis



Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif RPJMD/Ren stra tahun n (Rp)	Alokasi Anggaran DPPA tahun n (Rp)	Realisasi Anggaran tahun n (Rp)	Capai an Kiner ja tahu n n (%)	Capaia n Realis asi Angga ran tahun n (%)	Pelaksana a
	Penyusunan Dok RKA-SKPD	Penyusunan Dok RKA-SKPD						
Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Dok Perubahan RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan RKA- SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA- SKPD	1.815.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	100,0 0	100,00	Sekdis
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA- SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	3.025.000,00	2.548.000,00	2.548.000,00	100,0 0	100,00	Sekdis
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dok Perubahan DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan DPA- SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA- SKPD	2.420.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	100,0 0	100,00	Sekdis
Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.420.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	100,0 0	100,00	Sekdis
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja PD	2.420.000,00	3.146.000,00	3.146.000,00	100,0 0	100,00	Sekdis
Administrasi Perangkat Daerah	Tersusunnya Dok Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.442.998.7 97,00	4.564.477.5 53,00	4.421.917.9 48,00	100,0 0	96,88	Sekdis
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.368.583.79 7,00	4.453.686.95 3,00	4.311.127.34 8,00	100,0 0	96,80	Sekdis
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.500.000,0 0	92.360.000,0 0	92.360.000,0 0	100,0 0	100,00	Sekdis
Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	2.420.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	100,0 0	100,00	Sekdis
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dok Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.815.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	100,0 0	100,00	Sekdis
Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.025.000,00	3.511.600,00	3.511.600,00	100,0 0	100,00	Sekdis
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dok Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dok Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.815.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	100,0 0	100,00	Sekdis
Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwul anan/ Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	1.815.000,00	2.258.000,00	2.258.000,00	100,0 0	100,00	Sekdis



Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif RPJMD/Ren stra tahun n (Rp)	Alokasi Anggaran DPPA tahun n (Rp)	Realisasi Anggaran tahun n (Rp)	Capai an Kiner ja tahu n n (%)	Capaia n Realis asi Angga ran tahun n (%)	Pelaksana a
Penyusunan PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dok PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dok PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.025.000,00	3.801.000,00	3.801.000,00	100,0 0	100,00	Sekdis
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.920.000 ,00	133.759.500 ,00	133.489.202 ,00	100,0 0	99,80	Sekdis
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	12.100.000,0 0	8.142.500,00	8.139.000,00	100,0 0	99,96	Sekdis
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						
Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	14.070.000,0 0	14.070.000,0 0	14.068.000,0 0	100,0 0	99,99	Sekdis
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan						
Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan						
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.750.000,0 0	111.547.000, 00	111.282.202, 00	100,0 0	99,76	Sekdis
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Jumlah Dok Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD						
Pengadaan BMD PenunjangUrusa n Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dok Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dok Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	21.600.000, 00	82.500.000, 00	81.050.000, 00	100,0 0	98,24	Sekdis
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						
Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan						
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan						
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						



Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif RPJMD/ Ren stra tahun n (Rp)	Alokasi Anggaran DPPA tahun n (Rp)	Realisasi Anggaran tahun n (Rp)	Capai an Kiner ja tahu n n (%)	Capaia n Realis asi Angga ran tahun n (%)	Pelaksana
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21.600.000,00	82.500.000,00	81.050.000,00	100,00	98,24	Sekdis
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan						
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan						
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.120.000,00	313.777.500,00	283.424.054,00	100,00	90,33	Sekdis
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.300.000,00	30.524.500,00	27.624.500,00	100,00	90,50	Sekdis
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	139.150.000,00	253.055.000,00	229.203.554,00	100,00	90,57	Sekdis
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32.670.000,00	30.198.000,00	26.596.000,00	100,00	88,07	Sekdis
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.100.000,00	84.023.050,00	73.760.500,00	100,00	87,79	Sekdis
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60.500.000,00	73.053.050,00	62.790.500,00	120,00	85,95	Sekdis
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21.600.000,00	10.970.000,00	10.970.000,00	100,00	100,00	Sekdis



Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif RPJMD/Ren stra tahun n (Rp)	Alokasi Anggaran DPPA tahun n (Rp)	Realisasi Anggaran tahun n (Rp)	Capai an Kiner ja tahu n n (%)	Capai an Realis asi Angga ran tahun n (%)	Pelaksan a
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Tingkat Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja Daerah	24.160.494,00	32.827.400,00	32.827.500,00	99,29	100,00	Kabid Penta
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Cakupan Perusahaan yang telah difasilitasi penyusunan RTK Makro dan mikro	24.160.494,00	32.827.400,00	32.827.500,00	#DIV /0!	100,00	Kabid Penta
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dok Rencana Tenaga Kerja Makro						
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	24.160.494,00	32.827.400,00	32.827.500,00	22,67	100,00	Kabid Penta
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITA S TENAGA KERJA		Cakupan Tenaga Kerja Berkompetensi	702.804.743,00	998.605.141,00	989.227.282,00	100,00	99,06	Kabid Latas
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Naker yang mendapatkan sertifikat kompetensi	529.192.178,00	885.275.301,00	876.411.282,00	100,00	99,00	Kabid Latas
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berkbasis Kompetensi pada Tahun n	500.000.000,00	856.174.301,00	847.663.782,00	128,00	99,01	Kabid Latas
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koo rdinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	29.192.178,00	29.101.000,00	28.747.500,00	100,00	98,79	Kabid Latas
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kab/Kota	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kab/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja						Kabid Latas
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Cakupan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Difasilitasi Proses Akreditasi	26.492.890,00	20.382.000,00	20.354.500,00	#DIV /0!	99,87	Kabid Latas
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	26.492.890,00	20.382.000,00	20.354.500,00	100,00	99,87	Kabid Latas
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja								
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi						
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Cakupan perusahaan kecil yang mendapatkan pembinaan peningkatan produktivitas	147.119.675,00	92.947.840,00	92.461.500,00	#DIV /0!	99,48	Kabid Latas



Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif RPJMD/Ren stra tahun n (Rp)	Alokasi Anggaran DPPA tahun n (Rp)	Realisasi Anggaran tahun n (Rp)	Capai an Kiner ja tahu n n (%)	Capaia n Realis asi Angga ran tahun n (%)	Pelaksan a
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	147.119.675, 00	92.947.840,0 0	92.461.500,0 0	100,0 0	99,48	Kabid Latas
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota								
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dok Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah						
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Cakupan Penempatan Tenaga Kerja (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme pelayanan antar kerja	415.718.345 ,00	266.206.936 ,00	251.821.006 ,00	#DIV /0!	94,60	Kabid Latas
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kab/Kota		Cakupan tenaga kerja yang mampu dilayani	16.500.000, 00	4.356.500,0 0	4.351.500,0 0	#DIV /0!	99,89	Kabid Latas
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi						
Pelayanan antar Kerja	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	16.500.000,0 0	4.356.500,00	4.351.500,00	100,0 0	99,89	Kabid Latas
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan						
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terselenggara nya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaa n	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD						
Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja						
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota								
Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi						
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku						
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Tingkat penempatan CTK yang mendapatkan informasi dari pasar kerja	116.690.943 ,00	89.972.436, 00	85.321.436, 00	#DIV /0!	94,83	Kabid Penta
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	9.217.175,00	7.468.000,00	7.468.000,00	0,00	100,0 0	Kabid Penta



Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif RPJMD/ Ren stra tahun n (Rp)	Alokasi Anggaran DPPA tahun n (Rp)	Realisasi Anggaran tahun n (Rp)	Capai an Kiner ja tahu n n (%)	Capai an Realis asi Angga ran tahun n (%)	Pelaksana a
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaran ya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	32.473.768,0 0	32.890.436,0 0	29.740.436,0 0	0,00	90,42	Kabid Penta
Job Fair /Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	75.000.000,0 0	49.614.000,0 0	48.113.000,0 0	0,00	96,97	Kabid Penta
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota		Cakupan PMI yang mendapat pelayanan dan Perlindungan	282.527.402 ,00	171.878.000 ,00	162.148.070 ,00	#DIV /0!	94,34	Kabid Penta
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	74.075.869,0 0	45.671.500,0 0	38.071.500,0 0	0,00	83,36	Kabid Penta
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	58.451.533,0 0	37.813.500,0 0	36.213.500,0 0	0,00	95,77	Kabid Penta
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	150.000.000, 00	88.393.000,0 0	87.863.070,0 0	0,00	99,40	Kabid Penta
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota								
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota								
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Capaian kinerja penyelesaian Perselisihan HI melalui perjanjian bersama oleh mediator HI	138.249.625 ,00	135.063.000 ,00	132.575.500 ,00	108,0 0	98,16	Kabid HI
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota		Cakupan peraturan perusahaan yang menerapkan peraturan perusahaan dan Jamsos Naker dan Pengupahan	62.910.904, 00	64.404.500, 00	63.619.500, 00	#DIV /0!	98,78	Kabid HI
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan HI dan Terdaftar di WLKP Online	22.347.475,0 0	21.750.000,0 0	21.400.000,0 0	53,33	98,39	Kabid HI
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama						
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaran ya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	40.563.429,0 0	42.654.500,0 0	42.219.500,0 0	100,0 0	98,98	Kabid HI



Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif RPJMD/Ren stra tahun n (Rp)	Alokasi Anggaran DPPA tahun n (Rp)	Realisasi Anggaran tahun n (Rp)	Capai an Kiner ja tahu n n (%)	Capai an Realis asi Angga ran tahun n (%)	Pelaksan a
	Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan							
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota		Tingkat Mediasi perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan perusahaan di daerah	75.338.721, 00	70.658.500, 00	68.956.000, 00	#DIV /0!	97,59	Kabid HI
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berd ampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berd ampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	47.897.863,0 0	41.399.000,0 0	39.755.500,0 0	180,0 0	96,03	Kabid HI
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berd ampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Terselesaikanny a Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berd ampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	27.440.858,0 0	29.259.500,0 0	29.200.500,0 0	193,3 3	99,80	Kabid HI
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terselenggaran ya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi						
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kab/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina						
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						
			72.636.013, 00	88.670.600, 00	82.516.300, 00	122,0 8	93,06	Kabid Transmig rasi
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Capaian Kinerja Pembangunan Kawasan Transmigrasi	18.343.913, 00	33.378.500, 00	33.113.500, 00	#DIV /0!	99,21	Kabid Transmig rasi
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota		Cakupan Transmigran yang dilatih dan diberikan penyuluhan	18.343.913, 00	33.378.500, 00	33.113.500, 00	#DIV /0!	99,21	Kabid Transmig rasi
Pelatihan Transmigrasi	Terselenggarak annya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	18.343.913,0 0	33.378.500,0 0	33.113.500,0 0	93,33	99,21	Kabid Transmig rasi
PROGRAM PENGEMBANGA N KAWASAN TRANSMIGRASI		Capaian Kinerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi	54.292.100, 00	55.292.100, 00	49.402.800, 00	#DIV /0!	89,35	Kabid Transmig rasi



Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif RPJMD/Ren stra tahun n (Rp)	Alokasi Anggaran DPPA tahun n (Rp)	Realisasi Anggaran tahun n (Rp)	Capai an Kiner ja tahu n n (%)	Capaia n Realis asi Angga ran tahun n (%)	Pelaksan a
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		Cakupan SDM dan infrastruktur sosial ekonomi yang dikembangkan dalam rangka kemandirian SP	54.292.100,00	55.292.100,00	49.402.800,00	#DIV /0!	89,35	Kabid Transmig rasi
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	20.318.500,00	20.318.500,00	20.144.400,00	100,00	99,14	Kabid Transmig rasi
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	33.973.600,00	34.973.600,00	29.258.400,00	0,00	83,66	Kabid Transmig rasi

h. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	95,59	
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja PD	Tersusunnya Dok Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dok Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja PD	100,00	
Penyusunan Dok Perencanaan PD	Tersusunnya Dok Perencanaan PD	Jumlah Dok Perencanaan PD	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA- SKPD	Tersedianya Dok RKA- SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dok Perubahan RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dok DPA- SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA- SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dok Perubahan DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja PD	100,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dok Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00	
Pelaksanaan Penatausahaan danPenguian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Penguian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Penguian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dok Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100,00	



Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dok Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dok Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	100,00	
Penyusunan PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dok PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dok PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Jumlah Dok Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD		
Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dok Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dok Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	100,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan		
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100,00	



Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120,00	
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100,00	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Tingkat Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja Daerah	99,29	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Cakupan Perusahaan yang telah difasilitasi penyusunan RTK Makro dan mikro	#DIV/0!	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dok Rencana Tenaga Kerja Makro		
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	22,67	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Cakupan Tenaga Kerja Berkompetensi	100,00	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Naker yang mendapatkan sertifikat kompetensi	100,00	



Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	128,00	
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	100,00	
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kab/Kota	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kab/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja		
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Cakupan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Difasilitasi Proses Akreditasi	#DIV/0!	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	100,00	
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja				
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi		
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Cakupan perusahaan kecil yang mendapatkan pembinaan peningkatan produktivitas	#DIV/0!	
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	100,00	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota				
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dok Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Cakupan Penempatan Tenaga Kerja (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme pelayanan antar kerja	#DIV/0!	
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kab/Kota		Cakupan tenaga kerja yang mampu dilayani	#DIV/0!	
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi		
Pelayanan antar Kerja	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	100,00	
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		
Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota				



Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi		
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku		
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Tingkat penempatan CTK yang mendapatkan informasi dari pasar kerja	#DIV/0!	
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	0,00	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0,00	
Job Fair /Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	0,00	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota		Cakupan PMI yang mendapat pelayanan dan Perlindungan	#DIV/0!	
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	0,00	
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	0,00	
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	0,00	
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota				
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Capaian kinerja penyelesaian Perselisihan HI melalui perjanjian bersama oleh mediator HI	108,00	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota		Cakupan peraturan perusahaan yang menerapkan peraturan perusahaan dan Jamsos Naker dan Pengupahan	#DIV/0!	
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan HI dan Terdaftar di WLKP Online	53,33	
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	100,00	



Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota		Tingkat Mediasi perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan perusahaan di daerah	#DIV/0!	
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	180,00	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	193,33	
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kab/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		
			122,08	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Capaian Kinerja Pembangunan Kawasan Transmigrasi	#DIV/0!	
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota		Cakupan Transmigran yang dilatih dan diberikan penyuluhan	#DIV/0!	
Pelatihan Transmigrasi	Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	93,33	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Capaian Kinerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi	#DIV/0!	
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		Cakupan SDM dan infrastruktur sosial ekonomi yang dikembangkan dalam rangka kemandirian SP	#DIV/0!	
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	100,00	
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	0,00	

BAB IV

PENUTUP

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja pelaksanaan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara umum sudah mendekati tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja tersebut bukan berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, sehingga visi yang telah ditetapkan akan menjadi kenyataan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam priode tahun 2022 – 2026.

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, bahwa tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa secara umum dapat dikatakan berhasil, karena semua target yang ada dapat dicapai dengan baik. Hal ini terlihat dari porsentase realisasi pencapaian target yang telah ditetapkan dalam tahun 2025.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa tahun 2025, semoga dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan berikutnya.

Sekian dan terima kasih.

Sumbawa Besar, Februari 2026
Plt. Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

H. VARIAN BINTORO, S.Sos., M.Si
NIP. 19720123 199211 1 001



LAMPIRAN